



**BUPATI BUTON SELATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BUTON SELATAN**  
**NOMOR: 56 TAHUN 2022**

***TENTANG***

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

**TAHUN ANGGARAN 2021**



**BUPATI BUTON SELATAN  
PROVINSISULAWESITENGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN  
NOMOR : TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2021;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2021.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/ daerah selama suatu periode.

**BAB II**  
**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**Pasal 2**

(1) Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021, terdiri atas :

- a. Pendapatan;
- b. Belanja;
- c. Pembiayaan Daerah.

(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 21.571.251.539,00
b. Pendapatan Transfer	Rp. 601.555.287.801,00
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 18.612.221.000,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp. 641.738.760.348,00</b>

(3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. Belanja Operasi, meliputi:

1. Belanja Pegawai	Rp. 164.774.513.900,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 168.036.246.699,00
3. Belanja Bunga	Rp. 3.922.482.828,00
4. Belanja Subsidi	Rp. 0,00
5. Belanja Hibah	Rp. 7.283.050.505,00
6. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 2.275.000.000,00
7. Belanja Bagi Hasil Pajak	Rp. 0,00
8. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 0,00
<b>Jumlah Belanja Belanja Operasi</b>	<b>Rp. 346.291.293.932,00</b>

b. Belanja Modal, meliputi:

1. Belanja Modal Tanah	Rp. 634.408.437,00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 62.304.029.707,00
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 116.302.011.658,00
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 38.511.814.450,00
5. Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp. 2.225.745.000,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>Rp. 219.978.009.352,00</b>

c. Belanja Tak Terduga :

**Jumlah Belanja Tak Terduga      Rp. 6.765.492.564,00**

d. Belanja Transfer Bantuan Keuangan, meliputi :

1. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Rp. 98.207.990.200,00
2. Transfer Bantuan Keuangan ke Kelurahan	Rp. 0,00

**Jumlah Belanja Transefer      Rp. 98.207.990.200,00**

**Jumlah Belanja      Rp. 671.242.786.048,00**

**Surplus / Devisit      (Rp. 29.504.025.700,00)**

(4) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan Rp. 122.438.858.298,40

b. Pengeluaran Rp. 11.861.200.000,00

**Jumlah Pembiayaan Netto**

**Rp.110.577.658.298,40**

**SiLPA tahun berkenan**

**Rp. 81.073.632.598,40**

### **Pasal 3**

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

- (1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dirincikan lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

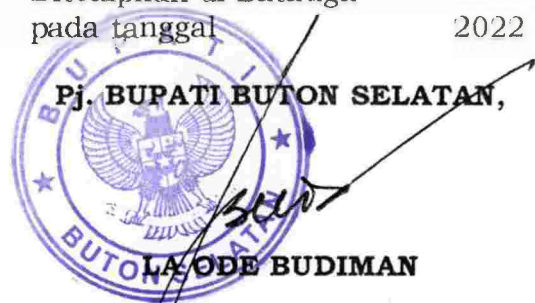
## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal 2022



Diundangkan di Batauga  
pada tanggal 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,**

**LA ODE BUDIMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR :**

**DAFTAR ISI**  
**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

<b>LAMPIRAN I. RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b>	<b>1-2</b>
<b>LAMPIRAN II. PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b>	

**01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

**1.01 PENDIDIKAN**

1 01 01	DINAS PENDIDIKAN .....	3-20
---------	------------------------	------

**1.02 KESEHATAN**

1 02 01	DINAS KESEHATAN .....	21-60
1 02 02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH .....	61-72

**1.03 PEKERJAAN UMUM**

1 03 01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG .....	73-91
---------	--	-------

**1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**

1 04 01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASANPEMUKIMAN .....	92-105
---------	--	--------

**1.05 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

10501	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA .....	106-115
10502	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH .....	116-120
1 05 03	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN .....	121-127



<b>1.06</b>	<b>SOSIAL</b>	
106 01	DINAS SOSIAL .....	128-141
<b>02</b>	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>	
<b>2.01</b>	<b>TENAGA KERJA</b>	
201 01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI .....	142-152
<b>2.02</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
202 01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK .....	153-161
<b>2.03</b>	<b>DINAS PANGAN</b>	
2.03.01	DINAS KETAHANAN PANGAN .....	162-172
<b>2.05</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	
2 05 01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP .....	173 -181
<b>2.06</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	
2 06 01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL .....	182-196
<b>2.07</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	
207 01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA .....	197-204
<b>2.08</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	
2 08 01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA .....	205-219



<b>2.09</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>	
2 09 01	DINAS PERHUBUNGAN.....	220-231
<b>2.10</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
2 10 01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .....	232-240
<b>2.11</b>	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	
2 11 01	DINAS KOPERASI,UKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN .....	241-255
<b>2.12</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>	
2 12 01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP .....	256-268
<b>2.16</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>	
2 16 01	DINAS KEBUDAYAAN.....	269-277
<b>2.18</b>	<b>KEARSIPAN</b>	
2 18 01	DINAS KERASIPAN DAN PERPUSTAKAAN .....	278-283
<b>03</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	
<b>3.01</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
3 01 01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN .....	284-297
<b>3.02</b>	<b>PARIWISATA</b>	
3 02 01	DIN ASPARIWISATA .....	298-309

<b>3.03</b>	<b>PERTANIAN</b>	
3 03 01	DINAS PERTANIAN .....	310-321
 <b>04</b>	 <b><i>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</i></b>	
<b>4.01</b>	<b>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	
4 01 01	SEKRETARIAT DAERAH .....	322-348
<b>4.02</b>	<b>PENGAWASAN</b>	
4 02 01	INSPEKTORAT .....	349-363
<b>4.03</b>	<b>PERENCANAAN</b>	
4 03 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH .....	364-379
<b>4.04</b>	<b>KEUANGAN</b>	
4 04 01	BADAN KEUANGAN DAERAH .....	380-407
<b>4.05</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>	
4 05 01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA .....	408-422
<b>4.07</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	
4 07 01	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN .....	423-429
<b>4.08</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	
4 08 01	SEKRETARIAT DPRD .....	430-446

<b>4.11</b>	<b>SEKRETARIAT KECAMATAN</b>	
4 11 01	KANTOR KECAMATAN BATAUGA .....	447-455
4 11 02	KANTOR KECAMATAN SAMPOLAWA .....	456-464
4 11 03	KANTOR KECAMATAN LAPANDEWA .....	465-470
4 11 04	KANTOR KECAMATAN KADATUA .....	471-476
4 11 05	KANTOR KECAMATAN SIOMPU .....	477-483
4 11 06	KANTOR KECAMATAN SIOMPU BARAT .....	484-490
4 11 07	KANTOR KECAMATAN BATUATAS .....	491-496
 <b>4.12</b>	 <b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	
4 12 01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK .....	497-507



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
 TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	604.787.836.863,00	641.738.760.348,00	30.950.923.485,00	106,11
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	18.693.051.625,00	21.571.251.539,00	2.878.199.914,00	115,40
1.1.1	Pajak Daerah	1.680.000.000,00	2.293.960.037,00	613.960.037,00	136,55
1.1.2	Retribusi Daerah	3.747.351.025,00	3.584.189.665,00	(163.161.360,00)	95,65
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.400.000.000,00	2.488.260.411,00	88.260.411,00	103,68
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	10.865.700.600,00	13.204.841.426,00	2.339.140.826,00	121,53
1.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	567.546.853.238,00	601.555.287.809,00	34.008.434.571,00	105,99
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	555.638.786.000,00	585.571.904.535,00	29.933.118.535,00	105,39
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	11.908.067.238,00	15.983.383.274,00	4.075.316.036,00	134,22
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	18.547.932.000,00	18.612.221.000,00	64.289.000,00	100,35
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.547.932.000,00	18.612.221.000,00	64.289.000,00	100,35
2	<b>BELANJA DAERAH</b>	718.315.518.813,00	671.242.786.048,00	(47.072.752.765,00)	93,45
2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	376.675.228.940,00	346.291.293.932,00	(30.383.935.008,00)	91,83
2.1.1	Belanja Pegawai	168.525.092.620,00	164.774.513.900,00	(3.750.578.721,00)	97,77
2.1.2	Belanja Bunga	4.590.000.000,00	3.922.482.828,00	(667.517.172,00)	85,46
2.1.4	Belanja Hibah	10.349.816.093,00	7.283.050.505,00	(3.066.765.588,00)	70,37
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.275.000.000,00	2.275.000.000,00	0,00	100,00
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	10.613.015.170,00	6.765.492.564,00	(3.847.522.606,00)	63,75
2.1.8	Belanja Bantuan Keuangan	98.209.001.000,00	98.207.990.200,00	(1.010.800,00)	100,00
2.2.1	Belanja Barang dan Jasa	190.935.320.227,00	168.036.246.699,00	(22.899.073.528,00)	88,01
2.2.2	Belanja Modal Tanah	640.000.000,00	634.408.437,00	(5.591.563,00)	99,13
2.2.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.988.002.867,00	62.304.029.707,00	(5.683.973.160,00)	91,64
2.2.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	121.561.041.691,00	116.302.011.658,00	(5.259.030.033,00)	95,67
2.2.5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40.332.229.294,00	38.511.814.450,00	(1.820.414.844,00)	95,49
2.2.6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.297.019.850,00	2.225.745.100,00	(71.274.750,00)	96,90



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(113.527.701.950,00)	(29.504.025.700,00)	84.023.675.250,00	25,99
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	125.388.901.949,00	122.438.858.298,40	(2.950.043.650,60)	97,65
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	31.857.851.449,00	31.359.741.449,40	1.890.000,40	100,01
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	93.531.050.500,00	90.579.116.849,00	(2.951.933.651,00)	96,84
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	11.861.200.000,00	11.361.200.000,00	0,00	100,00
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	11.861.200.000,00	11.361.200.000,00	0,00	100,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	113.527.701.949,00	110.577.658.298,40	(2.950.043.650,60)	97,40
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(0,00)	81.073.632.598,40	81.073.632.598,40	0,00

Batauga, 24 Agustus 2022  
Pj. BUPATI BUTON SELATAN



YA ODE BUDIMAN